

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

SRI FATMASARI SYAM



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SRI FATMASARI SYAM

A11110002



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

SRI FATMASARI SYAM
A111 10 002

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 8 Juli 2014

Pembimbing I



Dr. Hj. Nursini, SE., MA

NIP. 19660717 199103 2 001

*Ace ulugan
8/8/2014*

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M. Si

NIP. 19660811 1999103 2 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA., Ph.D

NIP. 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

SRI FATMASARI SYAM
A11110002

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **26 Agustus 2014** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Hj.Nursini,SE.,MA	Ketua	1
2.	Dr.Hj.Sri Undai Nurbayani,SE.,M.Si	Sekretaris	2
3.	Drs.H.Baso Siswadarma, M.Si	Anggota	3
4.	Dra.Hj.Fatmawati,M.Si	Anggota	4
5.	Drs.Muh.Yusri Zamhuri, MA.,Ph.D	Anggota	5

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Drs.Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D

NIP. 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : SRI FATMASARI SYAM

Nim : A111 10 002

Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU(S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

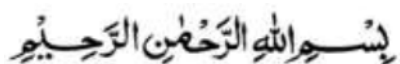
Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

SRI FATMASARI SYAM

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN”**. Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Gagaring Pagalung,SE.,MS.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs.Muh.Yusri Zamhuri,MA.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr.Hj.Nursini,SE.,MA selaku penasehat akademik sekaligus selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Hj.Sri Undai Nurbayani,SE.,Msi selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arah dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti selama perkuliahan.

5. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu selama ini.
6. Bapak dan Ibu pada Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih juga buat teman-teman dan keluarga serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Makassar, 28 Agustus 2014

SRI FATMASARI SYAM

Kupersembahkan kepada:

- *Kedua Orang tuaku,*

Almarhum bapak ku tersayang Drs.Syamsuriadi terimakasih atas limpahan kasih sayang yang telah bapak berikan, nasehat-nasehat bapak yang sangat berharga akan selalu ku ingat, maaf belum bisa membalas segala pengorbananmu, belum bisa membuatmu bangga, belum bisa membuatmu bahagia, semoga bapak tenang dan bahagia di Syurga.Amin
Mamaku tersayang Dra.Astati terimakasih atas limpahan kasih sayang, perhatian, dan doa tak henti, semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan kalian.Amin

- *Saudara-saudaraku tersayang,*

Kedua Kakak ku : Ary Azhary Syam, Asrul syam, dan Kedua Adikku : Nurul Amalia Syam, Rezki Akbar Syam terima kasih atas doa, serta segala dukungan yang telah diberikan,juga untuk kak nina dan keponakanku tersayang Ayra.

- *Saudara-saudari SPULTURA ku,*

Dian Aziza JS (bundaaa tersayang keep fighting maju terus pantang mundur), Ayu Yustika (Ukhty solehah, Insya Allah jodohnya mi kakak itutuh..hhehe), Vina Tamaya (Si pajokka,tinggalmi dimakassar ndi' supaya puaski jokka), Terima kasih kalian telah menjadi sahabat terbaik ku, terima kasih telah menemani dalam suka maupun duka. Semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai disini. Amin..... ♥ ♥ ♥

Sri Wahyuni (jangan menyerah semangat), Rifqa Latifadina (Mama dede yang selalu memotivasi), Muthya Nurfitriani (Aji lincah yang senang menolong) , Indah Gita Cahyani (Pendengar yg baik), Monica Cahya Dini (Putri keraton), Eva Irwanti (Sang Ibu Kritis), Fatmawati (Paling suka

Stand up comedy), Fajariah (lincah dan gesit), Yeni Masni (mandiri sekali, sukses yah sist), Elvira Fransiska Arruan (Si penari jago masak), Restuti Anggereny Rumahorbo (sukses dietnya yah), Jennifer M.A.Parung (Sukses yah di jekadah), Yusri Pasolang (Ajak” dong ke toraja), Sri Raehana (kapan ketemu lagi??), Liliyani (Tetap semangat), Amalia Nurul Alifa (Tetap semangat), Laura Virginia Sallolo (Yang tabah yah lau), Surya Ariwirawan (Si cerewet suka kentut), Herianto (Sikampongku Awwee na lombaika..hhaha), Ahyadi Jusaeman (Sikampongku juga ini bapak’e), Muh. Nizar Ramadhan (big bro, soal masak-memasak paling juara), Sukmawan (Si Playboy cantik), Patotori (Bro teman SMA ku sikampongto), Rony Wijaya (Si otot L-Men), Munawiruddin (Si muleeee), Fuad Dwi Darmawan (Si Galau), Muh. Ilham (Si pembalap dari korea), Sudirman Kahar (Suksesmi tawwa dipomala), Yudi Pratama (Adaji slot kosong golengan tawwa), Teguh Susilo Toni (Yo yo come on semangat yoo), Andi Tri Dharmanasatya (Si abang), Muhammad Nakib Rabbani (Instal laptop dule), Kevin Tjandra (Ampao na la), Tri Septia Nugraha (Ben Si raja sbob**), Dede Darmanto (sang peramal), Ahmad Faqhruddin Abdu-Rabb (Si ketua senat), Salman Samir (Si ketua angkatan), Wahyudi Husain (ustadz kita), Muh. Ainul Yakin (Penyanyinya Maros), Ashar (Tetap semangat), Ikram Sutanto (Tetap semangat), M. Rivqi Islan Amin (Tetap semangat), dan La Caesar Muhammad Muttaqien (Tetap semangat) .

Terima kasih atas segalanya.

**** Jika tua nanti kita tlah hidup masing-masing ingatlah hari ini ****

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN

Sri Fatmasari Syam

Hj. Nursini

Hj. Sri Undai Nurbayani

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2006-2013 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 7.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 99,71% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya 0,29% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) dan IPM (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Implikasi dari penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pencapaian IPM masih rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : *pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, IPM dan pertumbuhan ekonomi.*

ABSTRACT

THE EFFECTS OF GOVERNMENT EXPENDITURE IN EDUCATION SECTOR, HEALTH AND HDI TO ECONOMIC GROWTH SOUTH SULAWESI

Sri Fatmasari Syam

Hj. Nursini

Hj. Sri Undai Nurbayani

The objectives of this research is to analyze the effect of government expenditure in education sector, health and HDI to economic growth in South Sulawesi. By using time series data for the period 2006-2013 with the method of Ordinary Least Squares (OLS). The calculation of the data in this research using EViews 7.0 program.

The results of this research showed that 99.71% of the variation of independent variables in this study may explain the variable of economic growth in South Sulawesi, while the remaining 0.29% is influenced by other factors outside the model estimation. In partial government expenditure in education sector (X_1) and HDI (X_3) positive effect and no significant on the economic growth of South Sulawesi. Government expenditure in health sector (X_2) positive effect and significant on economic growth in South Sulawesi. The implications of this research government expenditure in education sector and HDI still low so that no significant on economic growth.

Keywords: *government expenditure in education sector, government expenditure in health sector, HDI and economic growth.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis.....	7
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik.....	9
2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	10
2.2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern.....	10
2.2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen.....	11

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	12
2.1.3 Konsep Pendidikan.....	15
2.1.4 Konsep Kesehatan.....	18
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan.....	21
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan.....	24
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.1.7.1 Indeks Harapan Hidup.....	28
2.1.7.2 Indeks Pendidikan.....	29
2.1.7.3 Standart Hidup Layak.....	30
2.1.8 Sumber Daya Manusia.....	30
2.2 Tinjauan Empiris.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Hipotesis.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2 Metode Analisis.....	35
3.3 Uji Kesesuaian.....	36
3.3.1 Analisis koefisien determinasi (R^2).....	36
3.3.2 Uji Statistik F.....	37
3.3.3 Uji Statistik t.....	38
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	38
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	40
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	41
4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.....	41

4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.....	43
4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
4.2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
4.3 Analisis Data.....	48
4.3.1 Hasil Uji Statistik.....	48
4.3.1.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	48
4.3.1.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)...	49
4.3.1.3 Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t).....	50
4.3.2 Interpretasi Model.....	51
4.3.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Sektor Kesehatan (X_2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2009 (Persen).....	4
2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM.....	28
4.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013.....	44
4.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013.....	46
4.3 Uji Signifikansi f ($\alpha = 0,05$) untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y.....	50
4.4. Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y.....	50
4.5 Hasil Perhitungan Statistik untuk Y.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2013 (Dalam Persen).....	40
4.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012 (Dalam Milyar Rupiah).....	43
4.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012 (Dalam Milyar Rupiah).....	45
4.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2013 (Dalam Persen).....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2013 (Dalam Persen).....	65
2 Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013.....	66
3 Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013.....	67
4 Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2013 (Dalam Persen).....	68
5 Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk perhitungan statistik pengaruh X_1 dan X_2 dan X_3 terhadap Y.....	69
6 Surat Bukti Penelitian (BPS Provinsi Sulawesi Selatan).....	70
7 Surat Bukti Penelitian (BPKD Provinsi Sulawesi Selatan).....	71
8 Biodata.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro,2003).

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional negara Indonesia adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang (Jhingan,2003).

Pemerintah memiliki fungsi dalam hal alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan

kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi (Dumairy, 1999).

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja (Notoatmodjo, 2009).

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada kedua sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk kedua sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (Bastias, 2010).

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian selama tahun 2010 meningkat setelah sedikit melambat pada tahun 2009, yakni 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 6,2 persen pada tahun 2009. Perekonomian Sulawesi Selatan diukur berdasarkan besaran PDRB atas harga berlaku 2010 sebesar Rp. 117,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 51,2 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai angka tertinggi selama periode 100 tahun terakhir setelah sebelumnya sedikit melambat. Perekonomian Sulawesi Selatan yang dicapai pada tahun 2010 dipicu oleh hampir seluruh sektor ekonomi.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2009(Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Makassar	8,60	10,24	7,16	8,09	8,11	10,52	9,20
2	Gowa	4,02	4,87	5,74	6,17	6,19	6,92	7,99
3	Pare-pare	5,01	6,23	5,98	6,96	6,96	7,56	7,93
4	Selayar	4,18	4,50	3,90	5,57	6,45	7,27	7,89
5	Palopo	8,53	7,37	7,72	6,32	6,53	7,44	7,86
6	Pinrang	4,75	5,89	6,04	4,12	5,14	6,73	7,65
7	Bone	4,56	2,11	4,31	5,95	6,01	7,24	7,54
8	Bantaeng	4,89	4,22	4,35	5,10	5,14	6,73	7,32
9	Sinjai	4,95	5,52	5,23	6,11	5,43	7,45	7,02
10	Luwu Utara	1,23	5,23	8,69	7,61	6,83	9,65	6,90
11	Luwu	6,54	6,11	7,16	5,51	5,53	5,73	6,82
12	Soppeng	4,02	5,32	2,85	6,63	5,37	7,76	6,81
13	Sidrap	4,24	3,29	8,25	6,96	5,46	8,23	6,66
14	Enrekang	5,26	5,34	5,91	3,77	5,11	6,94	6,62
15	Takalar	3,98	4,47	5,58	5,91	6,04	6,19	6,58
16	Bulukumba	3,64	4,69	4,48	6,38	5,36	8,06	6,47
17	Maros	3,84	2,17	3,11	4,33	4,58	5,61	6,27
18	Tana Toraja	2,61	4,23	4,82	4,07	5,35	7,18	6,10
19	Pangkep	1,98	6,19	5,61	5,92	6,12	7,16	5,91
20	Toraja Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,74
21	Barru	5,96	4,22	4,94	4,90	4,94	6,98	5,72
22	Jeneponto	3,76	2,07	1,21	3,97	4,06	5,78	5,38
23	Wajo	4,24	3,13	5,97	5,66	5,87	7,40	5,10
24	Luwu Timur	10,08	8,77	5,57	6,86	5,75	-2,44	-4,04
	SULSEL	5,42	5,26	6,05	6,72	6,34	7,78	6,20

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bastias, 2010).

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pada

gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri (Rasidin dan Bonar, 2004).

Betapa pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan manusia sebagai salah satu faktor produksi yang mendukung pembangunan suatu bangsa. Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

- a. Bagi penulis sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini telah diperoleh selama kuliah yang diinginkan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S-1).

- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pembangunan sehingga dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, menurut Prof.Simon Kuznets. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok teori yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan

neo-klasik, teori pertumbuhan ekonomi modern dan teori pertumbuhan ekonomi endogen (Nurlina, 2004).

Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2006).

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. Menurut Arsyad (1999) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik

dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dinamakan teori pertumbuhan klasik oleh karena dikemukakan oleh para ahli yang dikenal sebagai penganut aliran klasik. Teori ini meliputi teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijaksanaan *laissezfaire* (kebijaksanaan pajak dan zakat) atas sistem dan mekanisme untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi suatu masyarakat (Salam, 2008).

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas. Smith dan Richardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam ekonomi. Namun demikian David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dengan hanya mengandalkan modal, pada jangka panjang perekonomian akan menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Ricardo, peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya *the law of diminishing return* karena teknologi adalah bersifat *rigid* (kaku) dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik, keadaan stasioner

merupakan keadaan ekonomi yang sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup sejahtera sehingga tidak diperlukan lagi pertumbuhan yang berarti (Yohana, 2010). Para ahli teori klasik berpendapat bahwa perekonomian suatu Negara dapat tumbuh dan berkembang jika dititikberatkan pada pasar, selain itu peran pemerintah sangat membantu laju perkembangan suatu negara.

2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini diwakili oleh teori pertumbuhan Joseph Schumpeter, Alfred Marshal, Robert Solow dan Trevor Swan. Pendapat penganut aliran neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, Perkembangan merupakan proses gradual, Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, Adanya pemikiran yang optimis terhadap perkembangan, Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan (Suryana, 2000).

Menurut paham neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknologi tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga akan turun dan hasrat menabung turun. Dalam hal ini perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

2.1.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori ini adalah meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet dan teori Harrod-Domar. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui tahapan sebagai berikut: Masyarakat tradisional (*the traditional society*), Prasyarat lepas landas (*the precondition for take-off*), Lepas landas

(*the take-off*), Tahap kematangan (*the drive to maturity*), Masyarakat berkonsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*) (Suryana,2000).

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi,institusional dan ideologi yang diperlukannya (Suryana,2000).

2.1.1.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen,yang dipelopori olehRomer (1986) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi.Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik,seperti penjelasan mengenai *decreasing return tocapital*, persaingan sempurna dan eksogenitas tehnologi dalam model pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Teori Pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang ditentukan daridalam model dari pada oleh beberapa variabel pertumbuhan yang dianggap eksogen (Romer, 1994; Barrodan Martin,1999). Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara.Romer (1986) mengembangkan model pertumbuhan endogen sebagai akibat dari adanya *knowledge externality*. Suatu perusahaan dapat lebih produktifdai perusahaan lain karena perusahaan tersebut mempunyai rata-rata *stock konowledge* yang lebih tinggi dari pada perusahaan lainnya (Todaro, 2003).

2.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 2001).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu

menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1999).

Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (Dumairy, 1999).

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk program pinjaman. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang

dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2005).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy, 1999).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri , 2005).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1999).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesoebroto, 2001).

2.1.3. Konsep Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan: Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Sisdiknas, 2003).

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir dalam *World Commision on Environmental and Development*, 1997 dalam McKeown (dalam Dian Satria, 2008), bahwa *sustainable development* adalah: "*Sustainable development is development*

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai.

Studi-studi empiris di sejumlah Negara yang dilakukan oleh Barro (1991, 1998), Barro dan Lee (1993), Mankiw dan kawan-kawan (1991) serta Nelson dan Pack (1998) menjabarkan tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja atau penduduk yang terdaftar (*enrolment*) pada suatu tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan tingkat kesehatan umumnya diukur dengan tingkat harapan hidup (*life expectancy*). Demikian juga kualitas capital (mencerminkan proses teknologi) lebih penting dari kuantitasnya (akumulasi capital). Kewirausahaan termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001).

Perbaikan pendidikan diharapkan dapat memberi peluang pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan sebab dengan perbaikan pendidikan maka para pekerja memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoperasikan dan mengeksplorasi sumber daya ekonomi modern dan memanipulasi modal fisik. Perbaikan tersebut terutama harus diprioritaskan pada pendidikan dasar. Investasi dalam human capital adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas (produktivitas) tenaga kerja pada waktu tertentu. Investasi dalam human capital bukan hanya pengeluaran atau

belanja pendidikan formal dan pelatihan selama bekerja, tetapi termasuk juga belanja kesehatan dan migrasi. Produktivitas pekerja meningkat melalui perbaikan kesehatan fisik dan mental serta melalui perpindahan lokasi tempat mereka bekerja (Tambunan, 2001).

Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolah (Ilham, 2009).

2.1.4. Konsep Kesehatan

Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya standar hidup seseorang. Oleh karena itu, status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Setiap individu akan berusaha mencapai status kesehatan tersebut dengan menginvestasikan dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan (Grossman, 1972). Maka untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik tersebut dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula (Todaro, 2003).

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar (Pallutturi, 2005)

Dilihat dari perspektif ekonomi, kesehatan merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Teori ekonomi mikro tentang permintaan (*demand*) jasa pelayanan kesehatan menyebutkan bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah permintaan jasa pelayanan kesehatan. Teori ini mengatakan bahwa jika jasa pelayanan kesehatan merupakan *normal good*, makin tinggi *income* keluarga maka makin besar *demand* terhadap jasa pelayanan kesehatan tersebut. Sebaliknya jika jenis jasa pelayanan kesehatan tersebut merupakan *inferiorgood*, meningkatnya pendapatan keluarga akan menurunkan *demand* terhadap jenis jasa pelayanan kesehatan tersebut (Folland,2001).

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (Ilham, 2009).

Usia harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk indikator kesehatan, variabel yang digunakan adalah usia harapan hidup penduduk (Ilham,2009).

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan

ekonomi,serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Notoatmodjo, 2003)

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Notoatmodjo, 2003).

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Semakin tinggi nilai angka harapan hidup di suatu wilayah, maka mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi terutama yang terkait dengan fasilitas kesehatan wilayah tersebut semakin maju. Semakin maju pembangunan daerah di bidang kesehatan menunjukkan tingkat kesehatan yang

ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin (Notoatmodjo, 2003).

2.1.5. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah (Bastias, 2010).

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Bastias, 2010).

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab mengapa kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; pentingnya skala ekonomi; dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Solow (1958) juga telah melakukan analisa dari temuannya tentang residual dalam penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi (Khusaini, 2009).

Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan

ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas (Tomayah, 2004).

Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu: Meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. Memungkinkannya penyerapan informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien (Aini, 2008).

Meski modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan *engineering* lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi. Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS pada periode 1948-1979. Namun sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas (Andrianus, 2003).

Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen. Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas (Andrianus, 2003).

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Menurut Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Wahid, 2012).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik.

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

2.1.6. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid, 2012).

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah swasta, lembaga kementerian dan pengeluaran langsung oleh rumah tangga versi terbesar dari segi kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari pengeluaran rumah tangga. Program-program dibidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Situmorang, 2007).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus

dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (Tri Haryanto, 2005).

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut (Bastias, 2010).

Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Bastias, 2010).

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat (Situmorang, 2007).

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Implikasi dari penerapan teori *human capital* dibidang perbaikan gizi dan kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja dan daya tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Menurut Menteri Negara Kependudukan/BKKNB 1995, dalam Tjiptoherijanto (1997:18) mengatakan bahwa kecenderungan dan faktor penentu fertilitas dan mortalitas di Indonesia, data kesehatan penduduk Indonesia memperlihatkan gambaran yang cukup menggembirakan dimana tingkat kematian bayi, maka dapat disimpulkan tingkat kesehatan pada masa itu boleh dikatakan sangat bagus , makin turunnya tingkat kematian bayi maka makin tinggi pula tingkat harapan hidup, sehingga dapat melakukan kegiatan produksi nantinya dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1997).

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia

15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme* (1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran “bobot” manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan.

Dalam perhitungan IPM, Tahapan pertama penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks (Xi)} = (Xi - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Dimana:

X_i = indikator komponen IPM ke-i ($i = 1,2,3$)

X_{\max} = nilai maksimum X_i

X_{\min} = nilai minimum X_i

Persamaan tersebut akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)\end{aligned}$$

Dimana:

X_1 = indeks angka harapan hidup

X_2 = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi Per Kapita yang Disesuaikan (000)	732,7	300,0 (1996) 360,0 (1999) (2002)	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berikut ini uraian masing-masing indeks:

2.1.7.1. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan

informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel (e_0) diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2.1.7.2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/ *Adult Literacy Rate Index* (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index* (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam

suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2.1.7.3. Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjusted real per capita expenditure*) atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*)

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.1.8. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Susilo (2002) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”.

”Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan

Jackson,2002). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003).

"Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia harus memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka "sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2002). Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis (Kuratko dan Hodgets, 1998).

2.2. Tinjauan Empiris

Brata (2005) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini terhadap indeks pembangunan manusia (*IPM*) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula IPM yang dicapai. Variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Sedangkan variabel distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap IPM, artinya semakin merata distribusi pendapatan semakin baik pula pembangunan manusia.

Pertiwi (2007) meneliti tentang “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah periode 1999 dan 2002” penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana perbandingan output dan input yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis non parametrik dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan 63 variabel input yang digunakan yaitu pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan kesehatan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 1999-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Jawa tengah yang mencapai efisiensi sempurna (100%) untuk pengeluaran sektor pendidikan pada tahun 2002 adalah Kota Salatiga dan Boyolali. Adapun tingkat efisiensi tertinggi untuk pengeluaran sektor kesehatan dicapai oleh Kota Slatiga dan Surakarta.

Amrin (2007) meneliti tentang Analisis Investasi dalam Human Capital dan akumulasi modal fisik terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Human Capital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akumulasi Modal Fisik dan investasi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mulyaningsih (2008) meneliti tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia serta melihat hubungan pembangunan manusia terhadap pengurangan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 65 Panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah di sektor publik juga tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan, selain itu dalam model ke tiga pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Syamsurijal (2008) dalam jurnal ekonomi pembangunan meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Perkapita Di Sumatera Selatan”. Perbaikan kesehatan ternyata secara langsung memberikan pengaruh buruk terhadap peningkatan pendapatan perkapita, sedangkan secara tidak langsung (melalui perbaikan tingkat pendidikan) memberikan pengaruh positif, yang mana tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. Perbaikan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita.

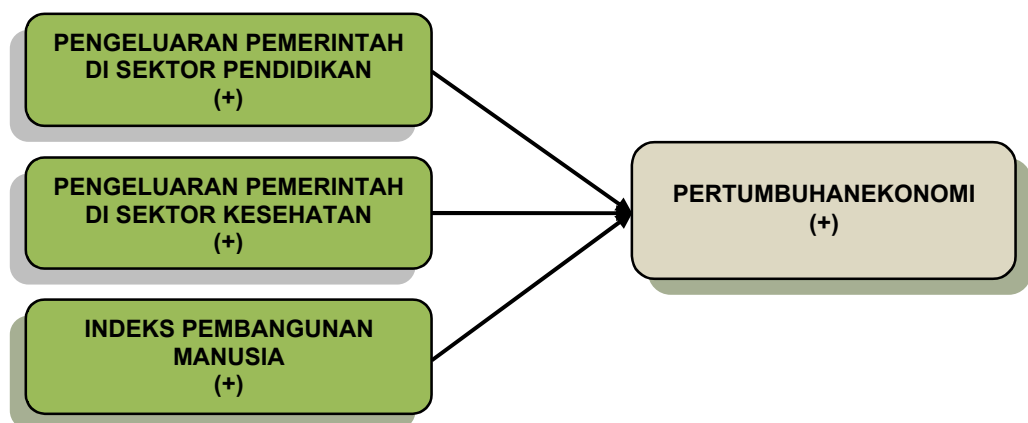
2.3. Kerangka Pemikiran

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan modal fisik, pertumbuhan modal manusia, dan kemajuan teknologi. Dalam hal modal

manusia, pertumbuhan ekonomi disamping dipengaruhi oleh kuantitas sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh kualitasnya. Kualitas sumberdaya manusia ini ditentukan oleh tingkat kesehatan dan pendidikannya. Makin tinggi kesehatan dan pendidikan sumberdaya manusia suatu bangsa maka makin tinggi kualitas sumberdaya tersebut, sehingga makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh bangsa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis:

- a. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
- b. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
- c. Diduga IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Jenis data yang digunakan yaitu: Pertumbuhan ekonomi, IPM, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-1) dan kesehatan (t-1) periode 2006-2013 Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, literatur-literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian yang bersangkutan.

3.2. Metode Analisis

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan maka akan dianalisis dengan menggunakan model uji statistik linear berganda. Uji statistik linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan linear antara dua atau lebih variabel melalui metode regresi.

Regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas atau independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) dengan variabel terikat atau dependen (Y). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X_2),

dan IPM (X_3) dengan variabel terikatnya dalam hal ini pertumbuhan ekonomi (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu hubungan fungsional.

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1) dan sektor kesehatan (X_2) menggunakan data hasil *timelag*($t-1$) artinya data yang digunakan mundur satu tahun (tahun sebelumnya), serta perlu di Ln karena satuan milyar rupiah sedangkan pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak perlu di Ln karena menggunakan satuan persen, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f(X_{1(t-1)}, X_{2(t-1)}, X_3) \dots \dots \dots (3.1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1(t-1)} + \beta_2 X_{2(t-1)} + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots \dots (3.2)$$

$$Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1(t-1)} + \beta_2 \ln X_{2(t-1)} + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (satuan persen)

$X_{1(t-1)}$ = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan tahun sebelumnya
(satuan milyar rupiah)

$X_{2(t-1)}$ = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tahun sebelumnya
(satuan milyar rupiah)

X_3 = IPM (satuan persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter yang akan diestimasi

μ_i = *Error term*

3.3. Uji Kesesuaian

3.3.1. Analisis koefisien determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X_2), dan indeks pembanguna manusia (X_3) terhadap

variabel dependen dalam hal ini pertumbuhan ekonomi (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2).

Koefisien Determinasi (R^2) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel–variabel dependen.

Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R^2 , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

3.3.2. Uji Statistik F

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan indeks pembangunan manusia (X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *Level of significance* 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

3.3.3. Uji Statistik t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: $H_0: \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh, $H_1: \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1: \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . Bila $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima (signifikan) dan jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ H_a ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2013. (satuan persen)
- b. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X_1) merupakan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan/di sektor pendidikan, penelitian ini menggunakan *time lag* (t-1) data yang digunakan mundur satu tahun (tahun sebelumnya). Dari data tahun 2005-

2012 digunakan untuk tahun 2006-2013 di Provinsi Sulawesi Selatan. (satuan milyar rupiah)

- c. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) merupakan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk membiayai penyelenggaraan kesehatan/di sektor kesehatan, penelitian ini menggunakan *time lag* (t-1) data yang digunakan mundur satu tahun (tahun sebelumnya). Dari data tahun 2005-2012 digunakan untuk tahun 2006-2013 di Provinsi Sulawesi Selatan. (satuan milyar rupiah)
- d. Indeks Pembangunan Manusia (X_3) merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan Hidup), dan pengeluaran perkapita data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006–2013. (satuan persen)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada koordinat 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Barat dengan Selat Makassar
- Di sebelah Timur dengan Sulawesi Tenggara
- Di sebelah Utara dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
- Di sebelah Selatan dengan Laut Flores

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum pemekaran Provinsi Sulawesi Barat mencapai 6.336.171 hektar atau sekitar 42 % dari luas wilayah Sulawesi. Namun setelah pemekaran, luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tinggal 4.666.453 hektar atau sekitar 31% dari luas wilayah Sulawesi, dan sekitar 3% dari luas wilayah Indonesia.

Perubahan luas wilayah tersebut ditandai dengan pemisahan lima kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar dengan dasar Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 maka terjadi perubahan luas Sulawesi Selatan yang berkurang sekitar 1.678.718 hektar. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 46.717,48 km².

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 8.034.776 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 2.945.429 jiwa (36,66 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 5.089.347 jiwa

(63,34 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 1,52 persen di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga yang tertinggi sebesar 16,66 persen di Kota Makassar. Penduduk laki-laki Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.924.431 jiwa dan perempuan sebanyak 4.110.345 jiwa.

4.2. Perkembangan Variabel Penelitian

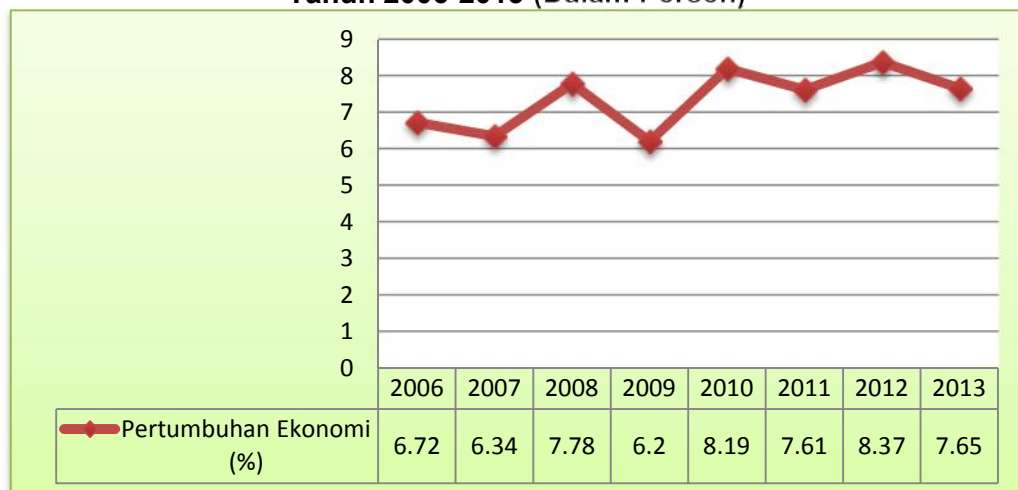
4.2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal ini akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. (Kuncoro; 2000).

Sumber daya manusia dalam arti angkatan kerja, input dalam proses produksi berperan aktif dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jumlahnya akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Stok kapital juga memegang peran yang sangat penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006-2013 (Dalam Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

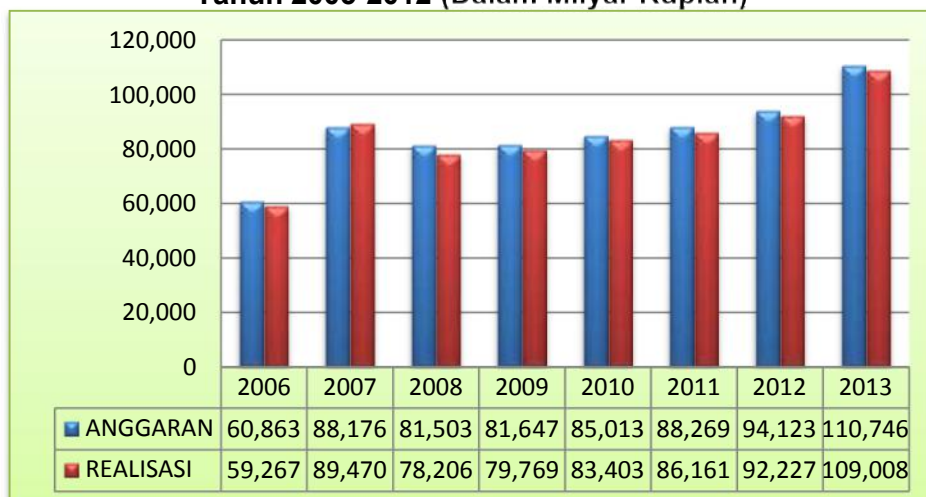
Pada Gambar 4.1 memperlihatkan, dari laju pertumbuhan ekonomi nampak bahwa selama periode 2006-2013 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2006 sebesar 6,72persen, melambat pada tahun 2007 sebesar 6,34 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 7,78persen pada tahun 2008,namun melambat pada tahun 2009 sebesar 6,2persen. Akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar 8,19persen namun kemudian melambat kembali menjadi 7,61persen pada tahun 2011. Tahun 2012 meningkat sebesar 8,37 persen.Dan terakhir adakembali melemah pada tahun 2013 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,65 persen.

4.2.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental bagi sebuah negara. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian pada sebuah negara berkembang. Pemegang kebijakan fiskal sangat berperan pada setiap kebijakan yang diambil khususnya memberikan *multiplier effect* pada area makro sebuah negara khususnya pada negara berkembang. Salah satu kebijakan fiskal yaitu pada *government expenditure* atau pengeluaran pemerintah dimana diharapkan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat mendorong kenaikan investasi dalam hal peningkatan mutu modal manusia.

Gambar 4.2
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2012 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jika dilihat dari Gambar 4.2 terlihat bahwa sejak tahun 2005-2012 pengeluaran pemerintah atas pendidikan pada sisi anggaran dan realisasi

mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 anggaran pengeluaran pemerintah atas pendidikan Rp.60.863.882.837 realisasi sebesar Rp. 59.267.792.410. Tahun 2006 anggaran meningkat sebesar Rp.88.176.821.251 dan realisasi sebesar Rp.89.470.294.663. Tahun 2007 mengalami penurunan anggaran Rp.81.503.023.248 realisasi sebesar Rp.78.206.253.031. Kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 anggaran sebesar Rp.110.746.526.656 realisasi sebesar Rp.109.008.666.364.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perekonomian adalah jarang terdapat reaksi yang ditimbulkan oleh suatu aksi secara seketika. Namun, hal ini memerlukan selang waktu atau *time Lag* (kelambanan) (Gujarati, 2003). Realisasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, tidak dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama. Maka untuk melihat efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya “time lag”.

Maka pada penelitian ini menggunakan *time lag* (t-1) data yang digunakan mundur satu tahun (tahun sebelumnya). Jadi data untuk tahun 2005 digunakan untuk tahun 2006 dan seterusnya. Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013

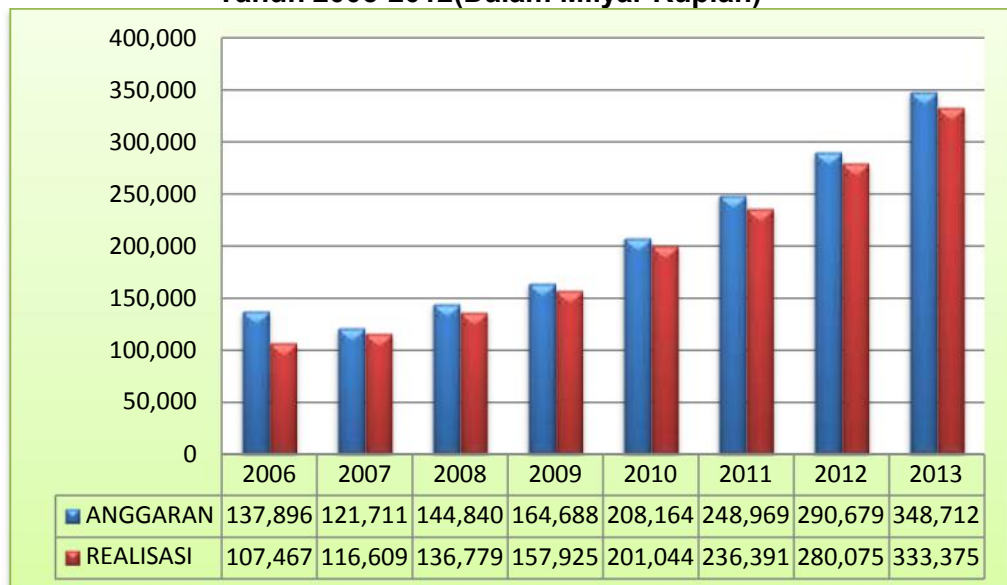
TAHUN	ANGGARAN (t-1)	REALISASI (t-1)	Rasio Efektifitas
2006	60.863.882.837,00	59.267.792.410,00	97.37%
2007	88.176.821.251,00	89.470.294.663,00	101.46%
2008	81.503.023.248,00	78.206.253.031,00	95.95%
2009	81.647.790.262,00	79.769.853.033,00	97.69%
2010	85.013.273.118,00	83.403.846.427,00	98.10%
2011	88.269.964.285,00	86.161.515.776,00	97.61%
2012	94.123.127.630,00	92.227.748.166,00	97.98%
2013	110.746.526.656,00	109.008.666.364,00	98.43%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk terus meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. Namun, besaran peningkatan anggaran dari tahun ke tahun harus efektif dan efisien, serta tepat pada sasaran.

Gambar 4.3
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2012(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jika dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 2005-2012 pengeluaran pemerintah atas kesehatan pada sisi anggaran dan realisasi mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2005 anggaran pengeluaran pemerintah atas kesehatan Rp.137.896.999.369,00 realisasi sebesar Rp.107.467.188.565,00. Tahun 2006 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp.121.711.155.478,00 realisasi sebesar Rp.116.609.786.099,00. Kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 anggaran sebesar Rp.348.712.603.517,00 realisasi sebesar Rp.333.375.968.652,34.

Sama halnya dengan penjelasan pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dalam hal ini pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak dapat langsung mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia di tahun yang sama. Begitu juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan adanya "time lag". Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013

TAHUN	ANGGARAN (t-1)	REALISASI (t-1)	Rasio Efektifitas
2006	137.896.999.369,00	107.467.188.565,00	77.93%
2007	121.711.155.478,00	116.609.786.099,00	95.80%
2008	144.840.465.209,00	136.779.221.374,48	94.43%
2009	164.688.685.836,00	157.925.557.000,00	95.89%
2010	208.164.123.397,00	201.044.149.332,20	96.57%
2011	248.969.320.402,00	236.391.823.675,44	94.94%
2012	290.679.934.848,00	280.075.857.616,00	96.35%
2013	348.712.603.517,00	333.375.968.652,34	95.60%

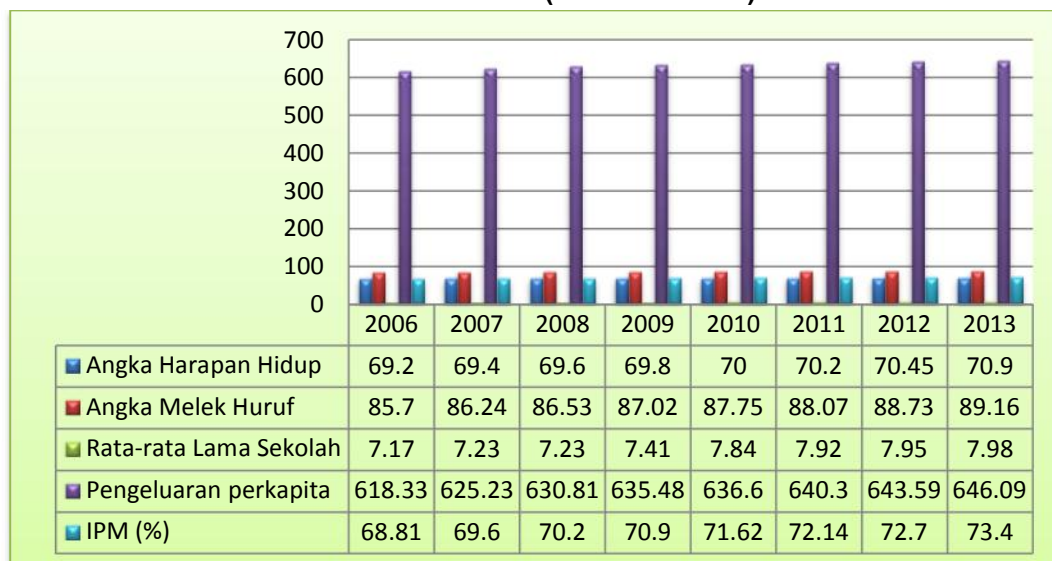
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu indikator pembangunan yang paling intensif dijadikan bahan untuk mengkritik kegagalan dan mengklaim keberhasilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Hampir

semuanya sudah paham bahwa IPM tersebut diukur pada tiga indikator yakni penguasaan pengetahuan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), derajat kesehatan (angka harapan hidup) dan kemampuan perekonomian masyarakat (daya beli). Indikator ini di satu sisi merupakan satu kesatuan yang saling komplementasi satu sama lain, tetapi di sisi lain juga dapat dialami pada setiap komponen indikatornya. Begitu pula kinerjanya di satu sisi dapat dilihat pada akselerasi dari pencapaian IPM tersebut, di sisi lain ia dapat pula dilihat pada posisi ranking sebuah kabupaten/kota dalam provinsinya, sebuah provinsi dalam negaranya, dan sebuah negara di antara negara lain di dunia.

Gambar 4.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006-2013 (Dalam Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Gambar 4.4 memperlihatkan IPM dari tahun 2006-2013 secara berturut-turut menunjukkan trend meningkat yaitu 68,81 persen pada 2006, 69,6 persen pada 2007, 70,2 persen pada 2008, 70,9 persen pada tahun 2009 hingga mencapai pada tahun 71 persen, 62 persen pada tahun 2010. Sedangkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan 2011 dan 2012 masing-masing yaitu sebesar 72,14 persen dan 72,7 persen terus meningkat hingga 73,4 persen pada tahun 2013.

UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: low (IPM kurang dari 50), lower-medium (IPM antara 50 dan 65,99), upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99) dan high (IPM 80 ke atas). Secara umum, daerah yang mempunyai capaian IPM yang tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang capaian IPMnya sedang maupun rendah. Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2005-2012 masih termasuk kategori menengah-atas/ upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99).

4.3. Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2006-2013 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 7.0 yang membantu dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.

4.3.1 Hasil Uji Statistik

4.3.1.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pada Tabel 4.5 (halaman 56) memperlihatkan bahwa, pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), indeks pembangunan ekonomi (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh dengan nilai sebesar $R^2 0.997127$.

Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) yaitu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), indeks pembangunan ekonomi (X_3) menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,71%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 0,29%.

4.3.1.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya apabila nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), indeks pembangunan manusia (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95 % ($\alpha = 0,05$) *degree of freedom* ($df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$) dan *degree of freedom* ($df_2 = n - k = 8 - 4 = 4$) diperoleh F-tabel sebesar 6.59. Dari hasil regresi pada Tabel 4.10 diperoleh F-statistik sebesar 462.7198 maka $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ (462.7198

>6.59). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.3
Uji Signifikansi F ($\alpha = 0,05$)
untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y

F-statistik	F-Tabel	Kesimpulan
462.7198	6.59	Signifikan

Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0

4.3.1.3 Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai $t_{\text{statistik}}$ lebih > nilai t_{tabel} atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 1%, 5%, atau 10%.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), indeks pembangunan manusia (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2013 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($df = n - k = 8 - 4 = 4$), maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.132.

Tabel 4.4
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$)
untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y

Analisis	t-statistik	t-Tabel	Kesimpulan
X_1	1.186639	2.132	Tidak Signifikan
X_2	2.993773	2.132	Signifikan
X_3	1.152225	2.132	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0

Dari Tabel 4.4 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara individu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) berpengaruh signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), dan indeks pembangunan manusia (X_3), tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95%.

4.3.2 Interpretasi Model

4.3.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Sektor Kesehatan (X_2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2013 dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 7.0 pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Statistik untuk Y

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/04/14 Time: 15:09
Sample: 2006 2013
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.64209	1.325842	10.28938	0.0005
X1	0.057369	0.048346	1.186639	0.3010
X2	0.280187	0.093590	2.993773	0.0402
X3	0.031019	0.026921	1.152225	0.3134
R-squared	0.997127	Mean dependent var		24.55639
Adjusted R-squared	0.994972	S.D. dependent var		0.172420
S.E. of regression	0.012226	Akaike info criterion		-5.663619
Sum squared resid	0.000598	Schwarz criterion		-5.623898
Log likelihood	26.65447	Hannan-Quinn criter.		-5.931519
F-statistic	462.7198	Durbin-Watson stat		2.535521
Prob(F-statistic)	0.000015			

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0

Hasil persamaan regresi antara pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), indeks pembangunan manusia (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2013 adalah:

$$Y = 13.6420939313 + 0.0573690241779 + 0.28018656046 + 0.0310186454725 + \mu \dots\dots\dots(4.1)$$

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan indeks pembangunan manusia (X_3), terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2013 adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.5 (halaman 56) dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi variasi perubahan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terlihat mengalami peningkatan. Namun, hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2006-2013($t-1$) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini berbeda dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk kemudian selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini hasilnya

bertentangan dengan teori yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pendidikan Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 27 persen per tahun, namun berdasarkan rincian belanja pendidikan yang ada tiga perempatnya digunakan untuk belanja pegawai. artinya kurang lebih 75 persen belanja pendidikan dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa dan juga belanja modal di sektor pendidikan masih rendah inilah yang menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Angka melek huruf Sulawesi Selatan masih jauh tertinggal dari angka nasional, meskipun angka melek huruf Sulawesi Selatan meningkat dari 85 persen pada tahun 2005 menjadi 88 persen pada tahun 2010 namun masih jauh dari angka nasional yang 93 persen pada tahun 2010. Angka melek huruf di Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga terendah di Indonesia, sesudah Papua dan Nusa Tenggara Barat serta terendah secara regional (Pulau Sulawesi). Posisi ini bahkan tidak berubah dalam enam tahun terakhir. Ketika Sulawesi Selatan mencatat angka melek huruf 87,75 persen pada tahun 2010, Sulawesi Utara sudah mencatat angka 99,30 persen yang merupakan angka tertinggi secara Nasional. Ini mengindikasikan perlunya melakukan intervensi secara serius terhadap penduduk buta huruf di Sulawesi Selatan.

Hambatan selanjutnya yakni dalam penyediaan layanan pendidikan yang masih belum menjangkau penduduk di tingkat kabupaten dibuktikan dengan angka melek huruf di perkotaan lebih baik dibanding di kabupaten di mana Makassar, Palopo, dan Pare-pare memiliki angka yang tertinggi. Sebaliknya, daerah kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Gowa, dan Takalar justru menunjukkan angka melek huruf yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan di tingkat kabupaten.

Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh Adi Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabelin dependen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Selain itu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan disektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Setelah itu produktifitas akan meningkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Sehingga pengeluaran tersebut tidak dapatsecara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga bisa dikarenakan dana untuk pembiayaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan pengalokasiannya belum efektif sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, ini artinya hipotesis terbukti.

Dari hasil regresi pada Tabel 4.5(halaman 56) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini terlihat pada probabilitasnya yaitu sebesar 0.0402dan nilai koefisien sebesar 0.280187, dengan demikian hipotesis terbukti.

Artinya, setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.280187%. Tren yang ditunjukkan oleh data pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada Tabel 4.2 (halaman 50) terjadi peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik seiring dengan peningkatan belanja kesehatan. Belanja kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai Rp. 1,7 triliun, di mana 48 persennya digunakan untuk belanja pegawai. Proporsinya terhadap total belanja tidak berubah 9 persen. Beberapa perbaikan telah dicapai. Rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk meningkat dari 2,2 persen pada tahun 2005 menjadi 2,7 persen pada tahun 2009 dan dari 15 persen pada tahun 2005 menjadi 16,5 persen pada tahun 2009. Angka harapan hidup meningkat dari 70,2 persen pada tahun 2007 menjadi 70,8 persen pada tahun 2010, mendekati angka nasional sebesar 70,9 persen. Angka kematian bayi berhasil diturunkan dari 30 pada tahun 2005 menjadi 26,6 pada tahun 2009 per 1.000 kelahiran. Angka kematian ibu turun dari 133 pada tahun 2006 menjadi 118 pada 2009 per 100.000 kelahiran.

Kebijakan kesehatan gratis, telah berhasil membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan gratis juga berkontribusi terhadap perluasan cakupan layanan kesehatan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil regresi pada Tabel 4.5 (halaman 56) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, artinya hipotesis tidak terbukti.

Rendahnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berkontribusi besar terhadap rendahnya capaian IPM Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang lebih dengan mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan untuk pemberantasan buta huruf serta mengupayakan peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Upaya pemberantasan buta huruf perlu difokuskan pada perempuan dengan fokus wilayah bagian selatan Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar dan Gowa. Sedangkan upaya peningkatan rata lama sekolah diarahkan pada kabupaten dengan kinerja jauh di bawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Wajo, dan Takalar.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan memang sudah cukup tinggi, yakni sekitar 7-8 persen. Tetapi ketimpangan pendapatannya masih cukup tinggi. Angka Gini Rasio terakhir tahun 2010 Sulawesi Selatan tercatat sebesar 0,4. Tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Selain itu, provinsi-provinsi lainnya juga melakukan program-program pembangunan manusia, sehingga angka IPM semua daerah bergerak naik. Dengan demikian pergeseran peringkat IPM tidak secara drastis berubah banyak. Perlu dipahami juga, bahwa daerah yang lebih awal memperhatikan pembangunan manusianya dan mengimplementasikan dengan berbagai program pembangunan manusia, maka akan memiliki angka IPM lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yang belum/terlambat melakukan pembangunan manusia.

Itulah penyebab mengapa angka IPM Sulawesi Selatan relatif lambat bergerak. Pergeseran peringkatnya pun relatif tidak berubah. Seolah-olah, berbagai program pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan tidak menampakan hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, pemerintah daerah gagal mensejahterakan masyarakatnya.

Selama kurun waktu 2008-2012, angka IPM Sulawesi Selatan dari 70,22 persen menjadi 72,70 persen dengan peringkat dari 21 menjadi 18. Tetapi reduksi shortfall IPM Sulsel selama periode ini sebesar 1,70 persen dengan menempati peringkat ke-tiga, setelah Bali dan Kaltim. Ini berarti Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan peningkatan angka IPM tercepat ketiga. Bandingkan dengan DKI yang pada periode 2008-2012 angka IPM-nya dari 77,03 menjadi 78,33 dengan selalu menempati peringkat pertama, tetapi reduksi shortfall-nya hanya 1,54 dan menempati peringkat ke-32 yang berarti DKI merupakan daerah dengan peningkatan angka IPM ter-lambat ke-dua.

Provinsi yang paling baik kemajuan pembangunan manusia-nya adalah Kalimantan timur. Selama kurun waktu 2008-2012, angka IPM-nya meningkat dari 74,52 menjadi 76,71 dan menempati peringkat ke-lima, dengan reduksi shortfall IPM-nya sebesar 1,71 yang merupakan daerah tercepat ke-dua peningkatan angka IPM-nya. Provinsi Bali, walaupun merupakan daerah dengan reduksi shortfall tertinggi pada periode yang sama, yakni 1,72; namun peringkat IPM-nya menempati urutan ke-14 dari 33 provinsi.

Dari gambaran di atas, apabila pemerintah Sulawesi Selatan ingin agar angka IPM dan peringkatnya lebih baik lagi, maka paling tidak harus bisa mempertahankan kecepatan kemajuan pembangunan manusia-nya atau bahkan bisa mempercepat lagi. Penerapan program kesehatan gratis dan pendidikan gratis serta dibarengi dengan program pengetasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang lebih baik lagi merupakan salah satu cara mempercepat kemajuan pembangunan manusia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang masih rendah dan pengalokasiannya belum efektif sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
- b. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis terbukti. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dengan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian pengeluaran di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik dan produktivitas penduduk ikut meningkat yang otomatis akan memicu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
- c. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Rendahnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berkontribusi besar

terhadap rendahnya capaian IPM Sulawesi Selatan. Rendahnya capaian IPM tersebut menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan proporsi anggaran pengeluaran disektor pendidikan. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang lebih dengan mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan untuk pemberantasan buta huruf serta mengupayakan peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan menengah dan tinggi didaerah.
- b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan hal ini dikarenakan pengalokasian anggaran di sektor kesehatan sudah cukup tinggi sehingga disarankan agar pemerintah tetap menjaga dan mengawasi agar pengalokasian anggaran ini bisa berjalan dengan baik.
- c. Penerapan program kesehatan gratis dan pendidikan gratis serta dibarengi dengan program pengetasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang lebih baik lagi merupakan salah satu cara mempercepat kemajuan pembangunan manusia khususnya didaerah pedesaan yang masih terkendala letak geografisnya.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan

variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ana Nurul. 2008. **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman**. Skripsi UNP. Padang.
- Adi Widodo. 2010. **Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia**. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Andrianus, Ferry. 2003. **Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (1970 – 2000)**. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi “KOMPETISI”. Vol. 1, No. 2, Mei 2003. hal 124-140
- Badan Pusat Statistik (BPS), **Sulawesi Selatan Dalam Angka**. Berbagai Edisi. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), **Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005-2012**. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. **Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri**. Rajawali Press. Jakarta.
- Bastias Dwi, Desi. 2010. **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009**. Univeritas Diponegoro. Semarang.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. **Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004**.
- Dumairy 1999, **Perekonomian Indonesia**, Erlangga, Jakarta.
- Firdaus Muhammad. 2004. **Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif**. Bumi Aksara. Jakarta
- Folland Sherman, Allen C. Goodman and Miron Stano. 2001. **The Economics of Health and Health Care**. Third Edition. New Jersey: Prentis Hall Inc.
- Ilham Irawan, 2009. **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia**. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

- Jhingan, M.L, 2003, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Penerjemah D.Guritno, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khusaini. 2009. **Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi**. Tangerang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, **Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan**. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Lincoln. Arsyad, 1999, **Ekonomi Pembangunan, Edisi 4 Cetakan Pertama, Yogyakarta**. Penerbit Bagian Penerbitan Sekiloh Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2001. **Ekonomi publik**, BPFE .Yogyakarta.
- Mulyaningsih Yani. 2008. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan**. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. **Pendidikan dan Perilaku Kesehatan**. Rineka Cipta: Jakarta.
- . 2009. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurlina. 2004. **Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam**. Program Studi Magister Ekonomi. Medan.
- Pallutturi, Sukri. 2005. **Ekonomi Kesehatan**. Penerbit : Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNHAS. Makassar.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2003), **Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, Jakarta.
- Pertiwi, Lela Dina (2007), **Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Periode 1999 dan 2002** .Skripsi.Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. **“Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia, : Pendekatan Model Computable General Equilibrium**. /ejournal.unud.ac.id
- Sadono Sukirno, 2006, **Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan**, cetakan ketiga. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Salam Kadir Abdul, 2008. **Teori-teori Pembangunan Ekonomi**, <http://www.abdulkadirsalam.com> ; Jurnal Ekonomi.
- Sisdiknas. 2003. **UU RI No 20: Sistem Pendidikan Nasional**. Jakarta
<http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>

- Situmorang, Armin Thurman. 2007. **Analisis Investasi Dalam Human Capital dan Akumulasi Modal Terhadap Peningkatan Produk Domestik**. Universitas Sumatera Utara
- Suryana, 2000. **Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Syamsurijal. 2008. **Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di Sumatera Selatan**. jurnal ekonomi pembangunan.
- Tjiptoherijanto, P. (1997). **Prospek perekonomian Indonesia dalam rangka globalisasi**. Cet. 1. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. **Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris**.: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro P, Stephen C. Smith. 2003. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Edisi Ketujuh,. Erlangga. Jakarta
- , 2006. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jilid I Edisi Kesembilan. Erlangga, Jakarta.
- Tomayah Nina dan Syaikhul Usman. 2004. **Alokasi pendidikan di Era Otonomi daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar**. Laporan Lapangan. Jakarta
- Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin. 2005. **Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur**. Majalah Ekonomi, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya
- UNDP, 1990. **Human Development Report 1990**. New York: Oxford University Press
- Wahid A, Bilal. 2012. **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Yohana, **Artikel Ekonomi**, 2010. <http://ana-ekonomi.blogspot.com>

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1**Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006-2013 (Dalam Persen)**

TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2006	38.867,68	6,72
2007	41.331,65	6,34
2008	44.549,82	7,78
2009	47.326,08	6,20
2010	51.199,90	8,19
2011	55.098,74	7,61
2012	59.708,63	8,37
2013	55.116,92	7,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 2**Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013**

TAHUN	ANGGARAN (t-1)	REALISASI (t-1)	Rasio Efektifitas
2006	60.863.882.837,00	59.267.792.410,00	97.37%
2007	88.176.821.251,00	89.470.294.663,00	101.46%
2008	81.503.023.248,00	78.206.253.031,00	95.95%
2009	81.647.790.262,00	79.769.853.033,00	97.69%
2010	85.013.273.118,00	83.403.846.427,00	98.10%
2011	88.269.964.285,00	86.161.515.776,00	97.61%
2012	94.123.127.630,00	92.227.748.166,00	97.98%
2013	110.746.526.656,00	109.008.666.364,00	98.43%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 3**Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan (t-1) 2006-2013**

TAHUN	ANGGARAN (t-1)	REALISASI (t-1)	Rasio Efektifitas
2006	137.896.999.369,00	107.467.188.565,00	77.93%
2007	121.711.155.478,00	116.609.786.099,00	95.80%
2008	144.840.465.209,00	136.779.221.374,48	94.43%
2009	164.688.685.836,00	157.925.557.000,00	95.89%
2010	208.164.123.397,00	201.044.149.332,20	96.57%
2011	248.969.320.402,00	236.391.823.675,44	94.94%
2012	290.679.934.848,00	280.075.857.616,00	96.35%
2013	348.712.603.517,00	333.375.968.652,34	95.60%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 4**Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006-2013 (Dalam Persen)**

TAHUN	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran perkapita	IPM (%)
2006	69.20	85.70	7.17	618.33	68.81
2007	69.40	86.24	7.23	625.23	69.60
2008	69.60	86.53	7.23	630.81	70.20
2009	69.80	87.02	7.41	635.48	70.90
2010	70.00	87.75	7.84	636.60	71.62
2011	70.20	88.07	7.92	640.30	72.14
2012	70.45	88.73	7.95	643.59	72.70
2013	70.90	89.16	7.98	646.09	73.40

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 5**Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 untuk perhitungan statistik pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y**

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 06/04/14 Time: 15:09
 Sample: 2006 2013
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.64209	1.325842	10.28938	0.0005
X1	0.057369	0.048346	1.186639	0.3010
X2	0.280187	0.093590	2.993773	0.0402
X3	0.031019	0.026921	1.152225	0.3134
R-squared	0.997127	Mean dependent var	24.55639	
Adjusted R-squared	0.994972	S.D. dependent var	0.172420	
S.E. of regression	0.012226	Akaike info criterion	-5.663619	
Sum squared resid	0.000598	Schwarz criterion	-5.623898	
Log likelihood	26.65447	Hannan-Quinn criter.	-5.931519	
F-statistic	462.7198	Durbin-Watson stat	2.535521	
Prob(F-statistic)	0.000015			

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0

Lampiran 6**Surat Bukti Penelitian (BPS Provinsi Sulawesi Selatan)**

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125

Makassar, 10 Juli 2014

Nomor : 73560.076
Lampiran : -
Perihal : Bukti Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Kota Makassar
di-

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, tanggal 03 April 2014 nomor : 1561/UN4.5.1/PL.02/2014, perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : **SRI FATMASARI SYAM**
NIM : A11110002
Program Studi : ILMU EKONOMI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN MINASAUPA BLOK AB 11/12

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul : **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan"**.

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang IPDS



M. Idris Muhiddin, S.Si
NIP. 195808031980011001

Lampiran 7**Surat Bukti Penelitian (BPKD Provinsi Sulawesi Selatan)**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telp. 453050
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Hasanuddin
 di –

Makassar

Dengan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

Nama : SRI FATMASARI SYAM
 NIM : A11110002
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
 PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN
 EKONOMI SULAWESI SELATAN"**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 8 Juli 2014

**KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**



Agustinus Appang, SE

Pangkat: Pembina TK I

NIP: 19600810 198902 1 003

Lampiran 8**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Sri Fatmasari Syam
Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang / 2 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Bugis
Alamat : BTN Minasaupa AB 11 No 12
Nomor HP : 085255897074
Alamat Email : srifatmasari@yahoo.co.id

**Riwayat Pendidikan**

- | | |
|---|-------------------|
| 1. SD Negeri Inpres Antang I Makassar | Tahun 1998 - 2004 |
| 2. SMP Negeri 21 Makassar | Tahun 2004 - 2007 |
| 3. SMA Negeri 9 Makassar | Tahun 2007 - 2010 |
| 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin | Tahun 2010 - 2014 |

Makassar, 28 Agustus 2014

SRI FATMASARI SYAM